

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pekerjaan sosial adalah sebuah tindakan humanisme yang sejak diperkenalkan ke dunia beberapa abad sebelumnya telah memiliki kekhawatiran yang mendalam dalam melibatkan warga, terutama orang-orang yang lemah dan terhambat. Misalnya, orang miskin, individu yang tidak mampu, serta jaringan yang jauh, standar pekerjaan sosial, bekerja dengan individu dan untuk daerah, menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memiliki kekuatan untuk penguatan warga.

Kemiskinan adalah masalah yang sudah sejak lama ada disekitar kita dan sampai saat ini belum bisa ditemukan pemecahan solusinya. Walaupun belum bisa ditemukan solusi atas masalah ini bukan berarti pemerintah benar-benar tutup mata atas masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. (Hall dan Midgley dalam Waskitho, 2018).

Kesenjangan ini terlihat karena awal dari dampak lanjutan dari kemajuan yang tidak menyentuh kepentingan individu di level bawah. Ini adalah akibat dari mulainya minimisasi individu karena membuat perkumpulan yang lemah, dan ketidak berdayaan yaitu kelompok-kelompok yang mengalami subordinat pada suatu warga, seperti rakyat kelas ekonomi rendah, grup minoritas etnis, wanita,

populasi lanjut usia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta masyarakat pada daerah terpencil adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan.

Pemerintah melalui salah satu programnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) mencoba untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan didalam masyarakat melalui program-programnya. Aspek terkecil yang disentuh oleh PNPM adalah mengenai kelemahan dan keruntuhan ekonomi kerakyatan saat ini. PNPM hendak menghidupkan kembali tumbuhnya ekonomi kerakyatan ditengah besarnya arus gelombang ekonomi kapitalis dan monopoli kaum pemilik modal yang menguasai sentral-sentral strategis perkonomian negara ini. Badan Kewasdayaan Masyarakat (BKM) dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi kemiskinan dan menjalankan program-program pemerintah dalam hal ini BKM akan langsung berhubungan dengan dana yang akan digunakan. Dalam mempertanggungjawabkan dana diperoleh dan yang digunakan maka dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan disini berfungsi untuk menunjukkan penggunaan dana oleh BKM mulai dari dana yang diperoleh sampai dengan dana yang digunakan sesuai dengan salah satu sifat akuntansi sektor publik yaitu transparan yang kemudian dilaporkan kepada Faskel yang merupakan tangan panjang dari satker PNPM Mandiri, laporan keuangan sendiri dilaporkan kepada faskel keuangan yang diharuskan membuat laporan keuangan konsolidasi untuk dilaporkan ke provinsi. “Pengelolaan keuangan program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri mengikuti

sistem dan prosedur akuntansi pemerintah (Pedoman Umum PNPM-Mandiri, 2007: 57)”.

Tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri, maka dunia usaha pun termotivasi untuk semakin berkembang dengan banyaknya bermunculan usaha-usaha di pedesaan. Sehingga mereka mendapat peluang kerja, meningkatkan usaha, dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga meningkat pula kesejahteraan daerahnya, baik yang bergerak dibidang jasa maupun industri terutama industri rumah tangga dan industri kecil. (Pedoman Umum PNPM-Mandiri, 2007: 57)”.

Pelaporan pengelolaan dana PNPM Mandiri yang akuntabel dan transparan merupakan kewajiban bagi BKM, karena dana yang diterima merupakan dana dari pemerintah sehingga didalam pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan demi suksesnya program PNPM-Mandiri serta terciptanya akuntabilitas publik. Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat. (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2007).

Berikut contoh kasus yang terjadi akibat tidak adanya transparansi pada laporan keuangan PNPM Mandiri Pedesaan.

Tebo, Jambi - Kejaksaan Negeri Tebo, Jambi menahan 3 orang tersangka kasus korupsi dana simpan pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Rimbo Bujang, Kamis (30/6/2022) siang. Berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Jambi, pada kasus ini negara dirugikan sebesar Rp747.647.000. Sementara, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Rimbo Bujang juga sudah mengembalikan uang sebesar Rp259.067.000, yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Tebo.

Sementara, pada tanggal 15 Mei 2019, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Tebo melakukan penggeledahan aset kantor PNPM di Kecamatan Rimbo Bujang. Sejumlah dokumen dan uang tunai turut diamankan penyidik Kejari Tebo untuk dijadikan alat bukti pada kasus tersebut. Selain barang bukti dokumen dan uang, kejaksaan juga menyita sebidang tanah seluas 1,8 hektar sebagai jaminan untuk pengembalian uang negara yang melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperindag Naker) Kabupaten Tebo.

Terkait penahanan ini, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tebo, Wawan Kurniawan, mengatakan bahwa ketiga tersangka yakni Sardi selaku ketua, Barokah sebagai Sekretaris PNPM Arta Makmur dan Eny Erawaty selaku Bendahara PNPM Arta Makmur. "Penahanan ketiga tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tebo nomor print - 32/L.5.17/Ft.1/06/2022," kata Wawan Kurniawan. Sebelum dilakukan penahanan, pendidik Kejaksaan Negeri Tebo melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Muara Tebo. "Ketiga tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak hari ini

tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 di Rutan Lapas Kelas IIB Muara Tebo," jelas Wawan.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara," pungkasnya. (*Sumber: tvonenews.com*). Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pelaporan sumber dan penggunaan dana sangat penting, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi contoh kasus diatas dalam lingkup perusahaan dengan masyarakat ikut berpartisipasi sebagai pengguna jasa perusahaan tersebut.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber dan penyaluran dana pada laporan keuangan, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pengurus inti saja dapat memberikan kesempatan bagi para anggota yang bersangkutan juga dalam UPK PNPM Mandiri Kecamatan

Matang Kabupaten Bintan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga kelompok usaha masyarakat ini.

Menurut Arifin (2017). Transparansi Laporan keuangan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Analisis transparansi laporan keuangan UPK PNPM-Mandiri Kec. Matang merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemerintah, pengelola (manajemen), masyarakat, dan pihak lainnya. Hasil analisis transparansi laporan keuangan UPK PNPM-Mandiri Kec. Matang memberikan gambaran penilaian keuangan UPK PNPM-Mandiri Kec. Matang. Keuangan yang sehat

menunjukkan bahwa UPK PNPM-Mandiri Kec. Mantang sebagai tangan panjang pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin yang mandiri, berhasil membawa misi program.

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah di atas, maka penulis menganggap penting memberikan batasan masalah sebagai bahan penelitian yaitu, Bagaimana **“Analisis Transparansi Laporan Sumber & Penggunaan Dana Pada UPK PNPM-Mandiri Di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti mengidentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya menganalisis laporan keuangan PNPM-Mandiri untuk mengetahui gambaran penilaian keuangan UPK PNPM-Mandiri Kec. Mantang, keuangan yang sehat menunjukkan bahwa UPK PNPM-Mandiri Kec. Mantang sebagai tangan panjang pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin yang mandiri, berhasil membawa misi program.
2. Transparansi dalam pelaksanaan UPK PNPM-Mandiri Kec. Mantang dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi



lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.

3. Jika tidak terjadi transparansi pada laporan keuangan UPK PNPM-Mandiri Kec. Mantang maka tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri, tidak akan terealisasikan kepada masyarakat.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Dari mana sumber dana untuk meningkatkan transparansi pada UPK Kec. Mantang Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana penyaluran dana untuk meningkatkan transparansi pada UPK PNPM Kec. Mantang Kabupaten Bintan?
3. Bagaimana penggunaan dana pada UPK PNPM Kec. Mantang Kabupaten Bintan?

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, maka masalah diatas perlu dibatasi. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus. Oleh karena itu, penelitian ini hanya untuk melihat bagaimana analisis transparansi laporan sumber & penggunaan dana pada UPK PNPM Kec. Mantang Kabupaten Bintan.



## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber dana untuk meningkatkan transparansi pada UPK PNPM Kec. Mantang Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengetahui penyaluran dana untuk meningkatkan transparansi pada UPK PNPM Kec. Mantang Kabupaten Bintan.
3. Untuk mengetahui kemana saja dana digunakan untuk meningkatkan transparansi pada UPK PNPM Kec. Mantang Kabupaten Bintan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi manfaat dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang sarjana (S1) dan menambah informasi mengenai analisis laporan keuangan dalam meningkatkan transparansi pada perusahaan (studi kasus pada UPK PNPM Mandiri).

### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk para anggota organisasi UPK PNPM Mandiri dan masyarakat lainnya yang sudah atau pun yang telah bergabung dalam organisasi ini agar tidak ragu lagi dalam transparansi dari sumber dan penyaluran dana pada laporan keuangan.

### 3. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi mengenai analisis laporan keuangan syariah dalam meningkatkan transparansi pada organisasi (studi kasus pada UPK PNPM Mandiri) sebagai salah satu landasan apabila ada suatu pengembangan penelitian dari para mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.

#### 1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika dari penelitian ini dari 5 bagian utama yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang kajian pustaka atau teori dan kerangka pemikiran.

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.**

Berisi mengenai objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian.

##### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, serta analisis data dan pembahasan.

##### **BAB V : PENUTUP**

Berisi pembahasan mengenai kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.